

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pantai Teluk Penyu merupakan salah satu pantai di Kabupaten Cilacap yang memiliki ciri khas dan potensi yang unik dari pantai lainnya. Di antara objek wisata pantai yang terkenal, Pantai Teluk Penyu menjadi *icon* wisata di Kabupaten Cilacap. Sebelumnya, objek wisata Pantai Teluk Penyu dipegang oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Cilacap. Pada saat itu, Pantai Teluk Penyu menjadi penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Cilacap. Namun, sejak Pantai Teluk Penyu dan dua objek wisata unggulan lainnya yakni Pantai Widara Payung dan Benteng Pendem dipegang oleh TNI, PAD Kabupaten Cilacap mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan, setelah Pantai Teluk Penyu dikelola oleh TNI AD masuk sepenuhnya ke koperasi kodam.

Pada awal tahun 2019, objek wisata Pantai Teluk Penyu yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap, dialihkan pengelolaannya kepada Kodam selaku pemilik tanah. Hal ini membuat, pembangunan dan penataan kawasan Pantai Teluk Penyu menjadi di bawah kendali TNI AD.

Dalam penelitian yang dikemukakan oleh (Eka, 2018) dinyatakan bahwa hambatan dalam penataan lokasi obyek wisata Pantai Teluk Penyu yaitu dana anggaran yang tidak mencukupi, masyarakat, kepemilikan tanah TNI, dan adanya jalur pipa pertamina. Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan tanah oleh TNI telah

menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan objek wisata Pantai Teluk Penyu. Dinas Pariwisata selaku penganggung jawab pengelola obyek wisata Pantai Teluk Penyu pada saat itu, terus melakukan upaya untuk menghadapi hambatan tersebut, salah satunya yaitu menjalin kerja sama setiap tahun dengan TNI AD sebagai pemilik lahan. Hal ini menjadi hal menarik mengenai bagaimana TNI AD sebagai pemegang kendali Pantai Teluk Penyu sejak 2019 melakukan kerja sama dengan pihak lainnya dalam mengelola Pantai Teluk Penyu sebagai icon wisata Kabupaten Cilacap, karena sebelumnya kepemilikan tanah oleh TNI AD menjadi salah satu hambatan Dinas Pariwisata dalam menata lokasi objek wisata Pantai Teluk Penyu.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dijelaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam peningkatan potensi pariwisata yaitu, memfasilitasi, mendorong penanaman modal, pengembangan pariwisata, mengelola pariwisata, dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata. Adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan peningkatan potensi Pantai Teluk Penyu sebagai icon wisata sangatlah penting. Namun, ditemukan bahwa pengelolaan Pantai Teluk Penyu saat ini tidak dipegang lagi oleh Pemda Cilacap tetapi dikelola oleh TNI AD. Hal ini menjadikan persoalan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh TNI AD sebagai pemilik tanah dan pengelola Pantai Teluk Penyu dengan Pemda Cilacap yang memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi pariwisata.

Di sisi lain ditemukan pula, permasalahan yang ada di Pantai Teluk Penyu yakni adanya masalah sampah yang berserakan di sekitar pantai. Pengelolaan sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah merupakan hal krusial untuk dilakukan sebab bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. Beberapa kajian mengatakan sampah yang dibiarkan akan mencemari area sekitar, merusak lingkungan sosial, dan dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan mereka yang ada di sekitarnya (Hasibuan, 2016; Mahyudin, 2017 dalam (Nusantara et al., 2022)). Hal ini tentu akan merugikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kajian lain juga mengungkapkan bahwa sampah yang pengelolaannya tidak baik akan memberikan dampak pada lingkungan, sosial dan kesehatan masyarakat di dekat objek wisata (Hupponen, Havukainen, & Horttanainen, 2023; Incekara, 2022 dalam (Nusantara et al., 2022)).

Keidentikan daerah pesisir pantai dengan daerah pariwisata membutuhkan peran dan partisipasi para stakeholder supaya dapat membangun objek wisata serta bisa menjaga lingkungan secara berkelanjutan (Minget al., 2020 dalam (Nusantara et al., 2022)). Untuk itu, pengelolaan sampah yang baik dapat dilakukan melalui kolaborasi antar stakeholder agar bisa meningkatkan pariwisata. Artinya, dengan melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan maka beban permasalahan akan menjadi ringan dan tujuan organisasi pun dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 terkait

Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Cilacap yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab kolektif antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Regulasi ini diterbitkan agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara baik melalui koordinasi dan kerja sama dari banyak pihak. Pada konteks ini, pemerintah dan pemerintah daerah memerankan tugas-tugas substansial diantaranya yaitu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik antarlembaga pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta agar pelaksanaannya berjalan secara terpadu. Peraturan ini diberlakukan untuk semua kawasan, di mana salah satunya adalah objek wisata. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang mempunyai cukup banyak objek wisata pantai. Pantai Teluk Penyu adalah satu dari beberapa objek wisata pantai di Kabupaten Cilacap yang banyak dikunjungi oleh wisatawan sekaligus menjadi *icon* wisata.

Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa permasalahan sampah di objek wisata Pantai Teluk Penyu masih kerap terjadi, penampakan sampah di beberapa area masih terlihat. Hal ini, dibuktikan dengan adanya berita-berita di media mengenai pencemaran sampah yang terjadi di Pantai Teluk Penyu.

Berdasarkan survei dan monitoring kawasan perairan Teluk Penyu Cilacap yang dilakukan oleh Pusat Studi Biosains Maritim (PSBM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) serta pihak lainnya sejak tahun 2015 menyatakan bahwa pencemaran makroplastik di wisata Pantai Teluk Penyu Cilacap berkisar antara 16.8–41.6 item/m², hampir sama dengan jumlah yang ditemukan di wisata pantai

di sekitar Laut China Selatan dan Pasifik Selatan (Chili) (serayunews.com, 2021). Hal tersebut menunjukkan tingginya pencemaran sampah di Pantai Teluk Penyu. Pencemaran sampah ini perlu diatasi dan dikelola tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta dari pihak lain baik swasta, LSM, maupun masyarakat dan pengunjung pantai. Sehingga *collaborative governance* sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu ini.

Dikutip dari radarbanyumas.co.id, seorang warga di sekitar pantai menyatakan bahwa meskipun sampah di pantai dibersihkan setiap hari apabila turun hujan maka sampah akan datang kembali, sehingga Pantai Teluk Penyu setiap hari tidak luput dari sampah. Warga lain juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, fasilitas seperti tempat sampah di sekitar pantai masih minim karena hanya terdapat beberapa saja, sehingga diperlukan peningkatan fasilitas dari pemerintah agar masyarakat ataupun pengunjung yang mengunjungi pantai dapat membuang sampah dengan mudah di tempatnya. Selain itu, kesadaran pengunjung juga perlu ditingkatkan.

Gambar 1.1 Keadaan Sampah di Pantai Teluk Penyu



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain fenomena yang ditemukan melalui media, menurut pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti melalui observasi saat pra penelitian juga ditemukan permasalahan sampah yang berserakan di sekitar Pantai Teluk Penyu. Selain dilakukan pemanfaatannya dari segi sumber daya yang tersedia di dalam laut, pemandangan pantai pun turut berperan khususnya dalam menarik perhatian pengunjung. Kawasan pantai perlu dikelola dengan baik termasuk dengan memperhatikan kebersihan di sekitar pantai agar daya tarik pengunjung terhadap pantai meningkat, sehingga dapat mendatangkan lebih banyak pengunjung (Jyantri et al., 2021).

Masalah kedua yang ditemukan di lapangan yakni ketersediaan tempat sampah di sekitar Pantai Teluk Penyu masih belum optimal. Berdasarkan penelitian Thaher (2010) dalam (Enggara et al., 2019), kesadaran terkait kelestarian lingkungan masyarakat kampung nelayan Malabero Kota Bengkulu masih minim. Masyarakat membuang sampah di pinggir pantai yang seringkali

menyebabkan munculnya bau yang tidak sedap serta menjadi sarang nyamuk dan lalat. Di Pantai Teluk Penyu sendiri tidak sedikit ditemukan sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga, seperti popok bayi, plastik kresek, kemasan sabun, kemasan jajan, dan sebagainya. Selain sampah rumah tangga, sampah lainnya yang turut menimbulkan pencemaran sampah di pantai yaitu sampah sisa-sisa makanan dan minuman serta bungkusnya dari para wisatawan yang berkunjung yang telah menikmati makanan di pedagang kuliner di sekitar pantai. Contohnya seperti botol minuman, bungkus plastik, dan sedotan.

Gambar 1.2 Kondisi Tempat Sampah yang Ada di Pantai Teluk Penyu



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan observasi pra penelitian oleh peneliti, ditemukan adanya tempat sampah yang tersedia di setiap warung di sekitar tepi pantai yang sulit dijangkau pengunjung. Tempat sampah tersebut diberikan oleh pihak swasta yakni Aqua kepada para pedagang yang memiliki warung di tepi Pantai Teluk Penyu. Meskipun telah tersedia, tempat sampah yang ada tersebut tidak cukup berdampak pada pencemaran sampah yang ada. Dapat dilihat pada gambar 1.2

bahwa penempatan tempat sampah diletakkan di depan warung sehingga membuat para pengunjung sulit untuk menjangkaunya. Padahal semestinya, pengunjung dapat menjangkau dan merasakan fasilitas tempat sampah dengan mudah agar mereka dapat membuang sampah di tempatnya (Oberservasi Pra Penelitian, 02 Mei 2023).

Pada kajian lain, *Collaborative Governance* terkait pengelolaan sampah plastik telah dilakukan di Kepulauan Seribu. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Chotimah, dkk, pemerintah setempat telah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik swasta, LSM maupun masyarakat setempat. Kolaborasi ini berbentuk komitmen untuk mengurangi sampah melalui beberapa upaya program, pembiayaan proyek, monitoring, serta penyediaan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah. Salah satu hasilnya adalah beroperasinya PSEL di Bantar Gebang oleh BPPT, yang memiliki kapasitas untuk mengolah 100 ton sampah per hari dan menciptakan energi listrik dengan besaran 700 KW (Chotimah et al., 2021).

Pengelolaan sampah yang buruk dapat berdampak pada penurunan wisatawan mengunjungi objek wisata pantai karena rusaknya keindahan laut yang disebabkan oleh sampah-sampah yang berserakan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Ain bahwa pencemaran sampah seperti sampah plastik berimplikasi pada penurunan wisatawan untuk berkunjung ke wilayah laut Indonesia karena rusaknya keindahan laut yang disebabkan oleh sampah-sampah tersebut (Ain et al., 2021).

Munculnya masalah sampah di pantai merupakan akibat buruknya tata kelola khususnya pemerintahan dalam hal pelestarian sektor kelautan yang penting. Dalam fenomena plastik sampah di Pantai Teluk Penyu, kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dapat menjadi hal penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. McGuire dalam (Ain et al., 2021) menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah upaya pengelolaan pemerintah yang memfasilitasi pemecahan masalah secara kolaboratif dengan melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah dalam implementasinya. Penanganan masalah sampah di Pantai Teluk Penyu bukan sekadar merupakan tanggungjawab satu pihak, tetapi juga melibatkan stakeholder yang lain yakni masyarakat, pemerintah dan swasta. Tata kelola kolaboratif yang melibatkan para stakeholder akan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di Pantai Teluk Penyu (Ain et al., 2021).

Berdasarkan beberapa literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat relasi yang positif antara *collaborative governance* dengan pengelolaan sampah sehingga sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk meneliti bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Adanya permasalahan sampah yang berserakan di sekitar Pantai Teluk Penyu dan fasilitas tempat sampah yang belum optimal.

2. Masih belum terlihat jelas kolaborasi yang dilakukan antara TNI sebagai pengelola pantai, Pemda sebagai pihak yang berperan penting dalam meningkatkan potensi pariwisata, serta pelaku usaha dan masyarakat yang memiliki peran dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sampah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan dengan meliputi:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapannya penelitian ini bisa menghasilkan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoritis ataupun praktis. Di bawah ini adalah manfaat yang menjadi harapan pada penelitian ini:

1. Manfaat yang bersifat Teoritis

Penelitian ini bisa menghasilkan manfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan, secara khusus terkait *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat bersifat praktis

- a) Bagi pemerintah, harapannya penelitian ini bisa menghasilkan saran dan masukan untuk pengambilan langkah yang tepat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini bisa memberikan informasi mengenai pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.
- c) Bagi peneliti, penelitian ini bisa memperluas wawasan dan pengetahuan tentang implementasi teori yang didapatkan dari mata kuliah yang telah diperoleh pada penelitian.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1	Muhammad Arja Farah, Anwar, M Hadi Makmur (2022)	Untuk mendeskripsikan implementasi kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi	Tahap perencanaan awal tata kelola dan pembuatan kebijakan pengelolaan sampah termasuk dalam pelaksanaan kolaborasi. Kedua, sosialisasi dan mengedukasi warga Desa Tembokrejo tentang pengelolaan sampah. Ketiga, pengumpulan sampah. Keempat, pengolahan sampah yang terkumpul dari rumah warga di TPST 3R.
2	Bella Dian Nusantara, Teguh, dan Tri Yuniningsih (2023)	Untuk menganalisis bagaimana kolaborasi pemerintah daerah kota Bengkulu dalam mengatasi sampah di objek pariwisata.	Kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan diskusi	Kolaborasi dalam mengatasi sampah yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu saat ini belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Masalah limbah di Pantai Jakat ditangani oleh otoritas setempat melalui penerapan regulasi pengelolaan sampah.
3	Maya Dayana (2021)	Untuk mengetahui kolaborasi stakeholders dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambatnya.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis berdasarkan masalah penelitian	Tidak adanya program kerja menyeluruh yang melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah dalam manajemen sampah, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya kerjasama dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk pengelolaan sampah yang efektif.

4	Hidayat Chusnul Chotimah, Muhammad Ridha Iswardhana, dan Lucitania Rizky (2021)	Untuk menganalisis Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Maritim Di Kepulauan Seribu	Kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara, webinar, dan studi literature	Kerjasama dalam pengelolaan limbah di Kepulauan Seribu melibatkan dialog, membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, menunjukkan komitmen yang kokoh terhadap proses kerjasama, memastikan pemahaman yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai, dan memantau hasil sementara yang dihasilkan dari kolaborasi pengelolaan sampah, termasuk limbah plastik laut.
5	Jati Puspita Rini, Ely Sufianti, dan Sait Abdullah (2020)	1) Untuk mengetahui model kerjasama antara pemerintah dan pemangku kepentingan di pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandung. 2) Untuk menganalisis masalah dalam model kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di kota Bandung. 3) Merumuskan dan merekomendasikan Kolaborasi Model Tata Kelola Pengelolaan Sampah Terpadu yaitu idealnya diterapkan di Kota Bandung	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Model kolaboratif menurut Teori Ansell dan Gash yang diolah oleh peneliti meliputi 3 indikator yaitu partisipasi, kemitraan, dan jejaring di antara para pemangku kepentingan Penta Helix, atau yang dikenal sebagai ABCGM, yaitu Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintahan, dan Media. Pengelolaan sampah dijalankan dengan pola konvensional yaitu kumpulkan-angkut-buang. Hasil penelitian menunjukkan kerjasama dan pembagian peran pemangku kepentingan belum berjalan. Selain itu, permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan sampah yang ada masih cukup kompleks.

6	K Q Ain, M A Nasri, M N Alamsyah, M D R Pratama dan T Kurniawan (2021)	Menganalisis bagaimana proses tata kelola kolaboratif berlanjut untuk lingkungan yang berkelanjutan.	Kualitatif dengan metode studi pustaka	Penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah plastik di Bali, lengkap dengan landasan hukumnya, telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat masih belum mencapai standar yang diinginkan, karena belum tercipta tujuan bersama di antara para pemangku kepentingan. Banyaknya sampah plastik di perairan sekitar Bali sebagian besar disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya pemahaman bersama.
7	Ranti Meidita Lestari dan Tazkiya Farahnisa (2020)	Menganalisis proses Collaborative Governance dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi proses kolaborasi dalam program cerobong sampah dan bank sampah di Desa Kramatwatu.	Deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pengelolaan kolaboratif dalam program cerobong sampah dan bank sampah di Desa Kramatwatu telah berhasil dilaksanakan, sesuai dengan indikator kerjasama yang diuraikan oleh Ansell dan Gash. Namun, ada satu aspek yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yaitu dedikasi dalam prosesnya. Proses kolaboratif ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keadaan awal, kepemimpinan yang fasilitatif, dan desain kelembagaan.
8	Andi Nur Qalby (2018)	Meneliti mengenai <i>collaborative governance</i> dalam hal inovasi Bank Sampah Pusat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.	Deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara.	Proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sudah berjalan. Dilihat dari banyaknya nasabah dalam pengelolaan sampah, dapat dikatakan bahwa keuntungan dalam proses inovasi telah berjalan. Namun, pencapaian inovasinya kurang berhasil. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi, pembagian

				informasi, dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, yang menghambat inovasi sehingga tidak berjalan dengan efektif.
9	Edwin Rinaldo dan Amy Yayuk Sri Rahayu (2019)	Mengetahui bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan sampah antara masyarakat dan PPSU tingkat Kelurahan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	Kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan alur pemikiran deduktif ke induktif atau dimulai dari menurunkan teori awal dan dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan	Prosedur pengelolaan sampah yang kooperatif telah terbentuk melalui partisipasi aktif lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Kewenangan tersebut terbagi ke berbagai lembaga, termasuk lembaga swadaya masyarakat, lembaga bank sampah masyarakat, PPSU tingkat kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat, dan dunia usaha. Entitas-entitas ini bekerja sama satu sama lain. Sistem kolaboratif ini dipengaruhi oleh berbagai variabel, seperti terbatasnya pemahaman masyarakat dalam memilah sampah, rendahnya komitmen masyarakat terhadap praktik pengelolaan sampah konvensional, kurangnya motivasi petugas sampah di tingkat RT dan RW, serta belum memadainya infrastruktur dan pengelolaan transportasi.
10	Made Bagus Megawan dan Ida Bagus Suryawan (2019)	Mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di objek wisata Pantai Candikusuma dan seberapa besar partisipasi dan keterlibatan masyarakat didalamnya.	Deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Pengelolaan sampah yang ada di objek wisata pantai Candikusuma Pantai sudah baik, namun keterlibatan masyarakat di dalamnya belum maksimal dan masih kurang peduli terhadap kebersihan pantai, proses identifikasi pengelolaan ini menggunakan proses antara lain <i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i> .

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2023

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arja Farah, Anwar, M Hadi Makmur (2022) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” mengungkapkan bahwa Proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Desa Tembokrejo dilakukan melalui kerja sama antara PT Systemiq Lestari Indonesia, desa Tambakrejo dan masyarakat. Terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut antara lain 1) Tata Kelola dan Kebijakan, 2) Sosialisasi pengelolaan sampah, 3) Bantuan sarana dan prasarana, 4) Pengumpulan sampah, dan 5) Daur ulang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farah, dkk (2022) ini, program pengelolaan sampah di TPST 3R Desa Tembokrejo telah berhasil membuat keadaan lingkungan di sekitar Desa Tembokrejo menjadi lebih baik. Dari program ini, diketahui bahwa perilaku masyarakat telah berubah, dan Desa Tembokrejo telah menjadi cerminan desa lain di Banyuwangi karena kesadaran dan kepedulian mereka terhadap sampah (Farah & Makmur, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Bella Dian Nusantara, Teguh, dan Tri Yuniningsih (2023) dengan judul penelitian “Analisis Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Sampah di Objek Pariwisata” mengungkapkan bahwa permasalahan sampah di objek wisata Pantai Jakat telah diatasi oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan peraturan pengolahan sampah. Dengan mengeluarkan peraturan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah menyelesaikan masalah sampah di objek wisata Pantai Jakat. Peraturan ini diterapkan dengan menertibkan pengunjung untuk mekanisme pengelolaan pembuangan sampah.

Sampah dapat dikategorikan berdasarkan jenisnya melalui penerbitan peraturan dan penegakan pengelolaan sampah (Nusantara et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Dayana (2021) dengan judul penelitian “Analisis Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Sampah di Objek Pariwisata” mengungkapkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, saat ini belum optimal karena berbagai faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut antara lain ketiadaan program kerja khusus yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta kurangnya kesadaran dan kemauan untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Dayana, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Chusnul Chotimah, Muhammad Ridha Iswardhana, dan Lucitania Rizky (2021) dengan judul penelitian “Model *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Maritim di Kepulauan Seribu” mengungkapkan bahwa *collaborative governance* meliputi dialog, menumbuhkan kepercayaan di antara peserta kolaboratif, dedikasi terhadap proses, serta pemahaman bersama tentang tujuan yang ingin dicapai, dan hasil sementara dari kolaborasi antara para pelaku dalam pengelolaan sampah plastik laut. Kolaborasi telah dilakukan secara baik oleh Pemerintah Kepulauan Seribu dengan pihak swasta, LSM, maupun masyarakat lokal. Kolaborasi ini berupa komitmen untuk mengurangi sampah dengan upaya-upaya program, pembiayaan proyek

pengelolaan sampah, monitoring, serta penyediaan infrastruktur dan teknologi (Chotimah et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Jati Puspita Rini, Ely Sufianti, dan Sait Abdullah (2020) dengan judul penelitian “Model Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Bandung” mengungkapkan bahwa model kolaboratif menurut Teori Ansell dan Gash yang diolah oleh peneliti meliputi 3 indikator yaitu partisipasi, kemitraan, dan jejaring di antara para pemangku kepentingan Penta Helix, atau yang dikenal sebagai ABCGM, yaitu Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintahan, dan Media. Pengelolaan sampah dijalankan dengan pola konvensional yaitu kumpulkan-angkut-buang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan belum dibagi dan kerja sama belum terbangun. Selain itu, permasalahan dalam proses pengelolaan sampah yang ada masih rumit (Rini et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh K Q Ain, M A Nasri, M N Alamsyah, M D R Pratama dan T Kurniawan (2021) dengan judul penelitian “Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Bali” mengungkapkan bahwa meskipun tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah plastik di Bali sudah berjalan dengan baik dan dasar hukum sudah ditetapkan, namun masih terdapat kekurangan yaitu pada keterlibatan dan kepatuhan masyarakat karena tidak adanya tujuan bersama di antara para stakeholder. Penegakan hukum yang lemah serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat ini menjadi faktor penyebab tingginya tingkat sampah plastik di lautan Bali (Ain et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Ranti Meidita Lestari, Tazkiya Farahnisa (2020) dengan judul penelitian “Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu” mengungkapkan bahwa proses kerjasama dalam program cerobong sampah dan bank sampah di Desa Kramatwatu telah berjalan dengan baik, mengikuti indikator-indikator kolaborasi yang diuraikan oleh Ansell dan Gash. Indikator-indikator ini meliputi dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling pengertian, dan hasil sementara. Meskipun demikian, tanda-tanda dedikasi terhadap proses tersebut belum terlihat secara maksimal. Proses kolaboratif ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi awal, kepemimpinan yang fasilitatif, dan desain kelembagaan (Lestari & Farahnisa, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Andy Nur Qalby (2018) dengan judul “Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)” mengungkapkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sedang dijalankan. Proses ini telah memberikan manfaat dalam hal inovasi, yang tercermin dari peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelanggan. Meskipun demikian, kurangnya kepercayaan, koordinasi, dan pembagian informasi antara stakeholders membuat inovasi tidak berjalan dengan efektif (Qalby, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Edwin Rinaldo dan Amy Yayuk Sri Rahayu (2019) dengan judul “Proses penanganan sampah secara kolaboratif

antara swadaya masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan (Kasus penanganan sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat)” mengungkapkan bahwa aktor pemerintah maupun non-pemerintah telah terlibat dalam proses penanganan sampah secara kolaboratif. Kewenangan ini terbagi di antara berbagai lembaga, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga bank sampah masyarakat, PPSU tingkat kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat, dan sektor swasta. Semua entitas ini berkolaborasi untuk mengelola sampah di masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemilahan sampah, tingkat kepatuhan individu terhadap praktik pengelolaan sampah yang sudah ada, kurangnya semangat petugas sampah di tingkat lingkungan dan komunitas, serta infrastruktur dan pengelolaan transportasi yang tidak memadai (Tampubolon & Sri Rahayu, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Made Bagus Megawan dan Ida Bagus Suryawan (2019) dengan judul “Pengelolaan Sampah Di Daya Tarik Wisata Pantai Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana” mengungkapkan bahwa meskipun pengelolaan sampah di objek wisata pantai Candikusuma Pantai sudah baik, namun keterlibatan masyarakat di dalamnya belum maksimal dan masih kurang peduli terhadap kebersihan pantai. Proses identifikasi dalam pengelolaan sampah ini menggunakan proses yang meliputi *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (Melaya et al., 2019)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni pada penelitian ini peneliti mengambil fokus pada pengelolaan sampah dengan lokus di Pantai Teluk Penyus Kabupaten Cilacap.

1.5.2. Administrasi Publik

A. Konsep dan Teori Administrasi Publik

Administrasi telah ada sejak lama dimulai dengan adanya proses kerja sama di antara dua pihak atau lebih yang ingin memenuhi capaian tujuan bersama. Dari adanya kerja sama pada saat itulah, muncul kelompok yang melakukan proses administrasi. Menurut Yogi (2011) dalam (Sellang, 2016), kata “Publik” termasuk kata serapan yang bersumber dari bahasa Inggris “public” di mana kata tersebut telah digunakan sejak lama oleh masyarakat bangsa Indonesia yang mengidentikkannya dengan masyarakat.

Chandler dan Plano (1988) dalam T. Kebang (2008) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumberdaya dan personel publik guna mengembangkan, menerapkan, serta melakukan pengelolaan keputusan-keputusan kebijakan publik (Sellang, 2016).

Siapa pun yang memiliki keterlibatan di dalam administrasi publik maka mereka akan membuat keputusan sesuai dengan hukum publik dan regulasi yang ada. Keputusan yang dibuat tersebut dipertimbangkan dengan faktor yang ada di dalam suatu situasi tertentu.

B. Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry mengemukakan enam paradigma administrasi publik (Aneta, 2012), di antaranya sebagai berikut:

Paradigma Pertama: Dikhotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Model ini merupakan paradigma dimana terdapat pemisahan antara ilmu politik dengan ilmu administrasi. Hal tersebut dikenali melalui adanya kemunculan buku yang berjudul *Politics and Administration* oleh Frank J. Goodnow tahun 1900, yang menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi dari pemerintahan yakni fungsi politik terkait pada kebijaksanaan dan fungsi administrasi terkait pada implementasi dari kebijaksanaan itu.

Paradigma Kedua: Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Pada paradigma ini muncul berbagai pandangan mengenai prinsip administrasi yang sifatnya universal dapat diterapkan kapan pun dan dimana pun. Sumber paradigma yaitu ditandai dengan adanya buku *Principles of Public Administration* karangan W.F. Willoughby tahun 1927. Fokus paradigma ini yaitu berkaitan dengan bagaimana proses penerapan berbagai prinsip administrasi yang ada.

Paradigma Ketiga: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma ini berpandangan bahwa ilmu politik dan administrasi adalah dua ilmu yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu politik telah memberikan masukan kepada ilmu administrasi, begitupun dengan sebaliknya. Tokoh yang berpengaruh dalam periode ini yaitu Herbert Simon.

Paradigma Keempat: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Menurut para pakar administrasi dalam model paradigma ini, mereka disingkirkan oleh pakar lainnya, sehingga mereka menggali ilmu administrasi dengan serius mengenai teori organisasi dan manajemen dalam rangka upaya mengefektifkan dan mengefisienkan suatu kegiatan. Tokoh yang berpengaruh pada paradigma ini, yaitu James D. Thompson, Herbert Simon, James G. March, Richard Cyert, dan Kith M. Hendarson.

Paradigma Kelima: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang)

Menurut paradigma ini, Herbert Simon mengungkapkan ada dua segi pokok yang harus mengalami perkembangan di dalam bidang ilmu administrasi negara, yakni para pakar administrasi negara yang memiliki minat pada pengembangan sebuah ilmu murni terkait administrasi dan yang satunya adalah kelompok yang lebih besar yang memiliki minat di bidang masalah kebijakan publik.

Prinsip Keenam: Governance (1990-sekarang)

Prinsip *good governance* ini muncul karena adanya tuntutan berbagai lembaga keuangan internasional yang ingin memperkuat institusi mereka di dalam menjalankan aktivitas yang didanai oleh organisasi tersebut. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kasus *bad governance* di dalam pelaksanaan kegiatan seperti lemahnya transparansi, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, adanya diskriminasi, dan masalah lainnya. *Good governance* adalah sebuah

pelaksanaan manajemen pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat) (Selling, 2016).

C. Dimensi Administrasi Publik

Perumusan mengenai administrasi bukanlah hal yang mudah, karena setiap ahli memiliki pandangan dan pendapatnya masing-masing, di mana hal tersebut tergantung pada pandangan mereka terhadap suatu sisi atau dimensinya. Oleh karena itu, satu dimensi saja tidak cukup untuk memandang administrasi publik secara keseluruhan.

T. Keban (2008) dalam (Selling, 2016), mengungkapkan bahwa administrasi publik harus dipandang setidaknya dari enam dimensi, yaitu:

- a. Dimensi Kebijakan, yakni berkaitan dengan proses pembentukan keputusan guna menetapkan metode atau solusi utama dalam pencapaian tujuan/sasaran.
- b. Dimensi Struktur Organisasi, yakni berkaitan dengan penataan struktur, seperti membentuk unit, membagi tanggung jawab di antara unit dari lembaga publik untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- c. Dimensi Manajemen, berkaitan dengan langkah pengimplementasian kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan mencapai sasaran, berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.
- d. Dimensi Etika, yaitu pemberian kode etik dan moral kepada administrator mengenai berbagai hal yang tepat serta yang kurang tepat.

- e. Dimensi Lingkungan, yaitu mengenai suatu kondisi atau situasi di mana akan memengaruhi dimensi lainnya, seperti dimensi tanggungjawab moral, kebijakan, manajemen, serta struktur organisasi.
- f. Dimensi Akuntabilitas Kinerja, yakni dimensi yang membuktikan kinerja nyata pemerintah dalam melaksanakan berbagai fungsi administrasi publik di sebuah negara.

1.5.3. Manajemen Publik

A. Pengertian Manajemen Publik

Laurence Lynn (1996) dalam (Wijaya & Danar, 2014) mengungkapkan pertimbangannya terhadap tiga kemungkinan mengenai konsep manajemen publik, yang meliputi seni, ilmu, dan profesi. Pertama, manajemen publik sebagai seni merupakan aktivitas kreatif yang diterapkan oleh para ahli yang tidak bisa dikaji menggunakan perhitungan, bertingkat fleksibilitas yang besar, dan bergantung kepada faktor situasi dan kondisi yang ada. Kedua, manajemen publik sebagai ilmu yang artinya manajemen publik membutuhkan suatu analisis sistematis yang disertai interpretasi dan ekplanasi. Ketiga, manajemen sebagai profesi yakni memusatkan perhatiannya pada orang-orang yang berdedikasi pada ilmu ini.

Inti dari manajemen publik adalah mengatur dan memberikan arahan sektor publik untuk berkolaborasi dalam rangka memenuhi capaian tujuan dan kebutuhan masyarakat dengan penggunaan pelayanan publik (Firdausijah et al., 2023).

]

B. Teori Manajemen Tradisional dan Kontemporer

Teori manajemen tradisional berawal dari karya Frederick W. Taylor yang mengungkapkan tentang prinsip manajemen yang berdasarkan pada perhitungan yang akurat dari proses kerja dalam sektor bisnis. Kemudian, konsep tersebut diadaptasi dan diimplementasikan dalam sektor publik. Hasil dari representasi teori tersebut menghasilkan tujuh fungsi utama manajemen POSDCORB, meliputi:

- 1) *Planning*
- 2) *Organizing*
- 3) *Staffing*
- 4) *Directing*
- 5) *Coordinating*
- 6) *Reporting*
- 7) *Budgeting*

Model manajemen tradisional pada sektor publik ini mendapat kritikan sebab belum memenuhi konsep hubungan antara birokrasi dengan pimpinan politik secara intensif (Wijaya & Danar, 2014).

Kemudian, muncul pemikiran para sarjana tentang perubahan kontemporer organisasi dan manajemen dari para birokrat sehingga membuat keberadaan teori modern yang memulai ekstensinya yaitu Teori *New Public Management* (NPM).

1.5.4. Collaborative Governance

A. Konsep Collaborative Governance

Menurut Dwiyanto (2018) *governance* mempunyai atensi pada urgensi partisipasi para stakeholder saat proses mengambil keputusan. Hal tersebut disebabkan karena proses mengambil keputusan makin rumit dengan berbagai kesulitan dan masalah yang ditemui (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020).

Roderick Arthur William Rhodes berpandangan bahwasanya *governance* mengacu pada pergeseran dari tata kelola pemerintahan yang memiliki makna lebih luas mencakup proses baru pengaturan, perubahan kondisi kaidah pengaturan, atau sebuah metode baru di mana masyarakat diatur (Rhodes, 1996 dalam (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020)).

B. Pendekatan Collaborative Governance

Menurut Bryson et al., 2006 memahami *collaborative governance* dapat dilihat pada penekanan lima hal (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020), yaitu:

1. Kondisi awal (*Initial Conditions*)

Kondisi awal di sini menyangkut tiga hal yaitu lingkungan tempat dilakukannya kolaborasi, kemungkinan kegagalan yang dapat terjadi, dan persyaratan khusus yang perlu ada supaya terjadi kolaborasi.

a) Faktor Lingkungan

Dengan bekerja bersama banyak orang maka hal tersebut secara langsung akan berhubungan dengan kondisi lingkungan yang ada,

sehingga dalam hal ini dibutuhkan suatu organisasi yang bisa menyatukan organisasi tersebut.

Di dalam kolaborasi di sektor publik, lingkungan publik sangatlah penting karena hal tersebut meliputi sistem hubungan yang luas di setiap wilayah yurisdiksi publik di mana hal ini dapat secara langsung berdampak pada struktur, tujuan, serta output kerjasama (Scott dan Meyer, 1991 dalam (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020)).

b) Kegagalan

Adanya kolaborasi antar sektor salah satunya yaitu dipengaruhi oleh adanya upaya untuk memecahkan suatu permasalahan publik yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan. Sehingga kegagalan upaya tersebut akan mendorong organisasi tersebut untuk melibatkan organisasi lain di dalam penyelesaian masalah yang ada.

c) Mekanisme Penghubung dari Pembentukan Kolaborasi

Kondisi mekanisme penghubung adalah aspek lain yang mempengaruhi pembentukan kolaborasi, selain faktor lingkungan dan potensi kegagalan.

2. Komponen Proses (*Process Components*)

Terdapat sejumlah elemen yang dititikberatkan oleh para peneliti dalam proses kolaborasi, yaitu:

1) Membuat Kesepakatan Awal

Perjanjian meliputi perjanjian formal dan perjanjian informal. Perjanjian informal mengenai komposisi, tujuan, serta proses kolaborasi

bisa berlangsung lancar, sedangkan perjanjian formal memiliki keunggulan dalam hal akuntabilitas (Donahue, 2004 dalam (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020)).

2) Membangun Kepemimpinan

Menurut Crosby dan Bryson (2005b) dalam (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020), pemimpin memiliki dua peran utama di dalam kepemimpinannya, yaitu pemimpin pelindung dan pemimpin pilihan. Pelindung (*sponsor*) adalah seseorang yang meskipun tidak secara langsung berpartisipasi rutin dalam pelaksanaan kolaboratif, memiliki kehormatan, otoritas, serta akses ke sumberdaya yang bisa digunakan untuk kolaborasi. Pilihan (*champion*) adalah mereka yang memiliki fokus menjaga kolaborasi agar dapat berjalan dalam pencapaian tujuan dengan membantu menggunakan keterampilannya.

3) Membangun Legitimasi

Menurut Human dan Provan (2000) dalam jaringan membutuhkan tiga dimensi (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020), yaitu:

- a. Legitimasi jaringan sebagai sarana untuk menarik dukungan dan sumberdaya, termasuk dari dalam ataupun luar;
- b. Legitimasi jaringan sebagai entitas yang diakui oleh para stakeholders, termasuk dari dalam ataupun luar;
- c. Legitimasi jaringan sebagai interaksi yang menumbuhkan rasa percaya para anggota dalam melakukan komunikasi dengan bebas pada jaringan.

4) Membangun Kepercayaan

Adanya hubungan saling percaya di antara para aktor kolaborasi digambarkan sebagai inti dari proses kolaborasi tersebut. Salah satu hal utama agar pelaksanaan kolaborasi dapat berhasil yaitu adanya rasa saling percaya di antara pihak yang terlibat.

5) Mengelola Konflik

Munculnya konflik di dalam proses kolaborasi disebabkan karena setiap individu ataupun organisasi yang bermitra memiliki tujuan serta harapan yang berbeda. Sehingga ketidaksamaan tersebut menjadi salah satu pemicu adanya perdebatan yang kemudai berujung menjadi suatu konflik.

6) Perencanaan

Ada dua pendekatan untuk melihat perencanaan kolaborasi, yang pertama mengacu pada perencanaan informal, dan yang kedua memiliki pandangan bahwa komunikasi di antara para stakeholders akan memunculkan pemahaman yang rinci terkait tahapan, peran, tujuan, dan misi.

3. Struktur dan Tata Kelola (*Structure and Governance*)

Hubungan otoritas, pembagian kerja dan spesialisasi tugas, aturan dan standar prosedur operasi, serta tujuan adalah beberapa komponen struktur dalam kolaborasi. Struktur ini meliputi komponen vertikal dan horizontal.

1) Konteks Struktur (Structure in Context)

2) Konfigurasi Struktural (Structural Configurations)

3) Tata Kelola (Governance)

4. Kontingensi dan Kendala (*Contingencies and Constraints*)

Faktor-faktor yang memengaruhi jalannya proses, struktur, dan tata kelola kolaborasi, serta keberlanjutan secara menyeluruh, yaitu:

- 1) Jenis kolaborasi
- 2) Ketidakseimbangan kekuatan di antara para anggota
- 3) Logika kelembagaan yang bersaing dalam kolaborasi

5. Hasil dan Akuntabilitas (*Outcomes and Accountabilities*)

1. Hasil

Terdapat tiga kategori untuk melihat hasil kolaborasi antar sektor, yaitu:

- a) nilai publik
- b) efek pertama, kedua, serta ketiga
- c) ketahanan serta penilaian kembali

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi masalah kompleks dalam proses kolaborasi karena kerap kali terjadi ketidakjelasan pertanggung jawaban kolaborasi.

C. Model Prinsip Collaborative Governance

H. Brinton Milward dan Keith G. Provan membagi model *collaborative governance* menjadi tiga model, yaitu meliputi (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020):

1. Model *self-governance*

Model ini dikenali dengan struktur di mana semua stakeholder berpartisipasi dalam jaringan dan mengelolanya secara bersama-sama, tanpa memerlukan badan administratif.

2. Model *lead organization*

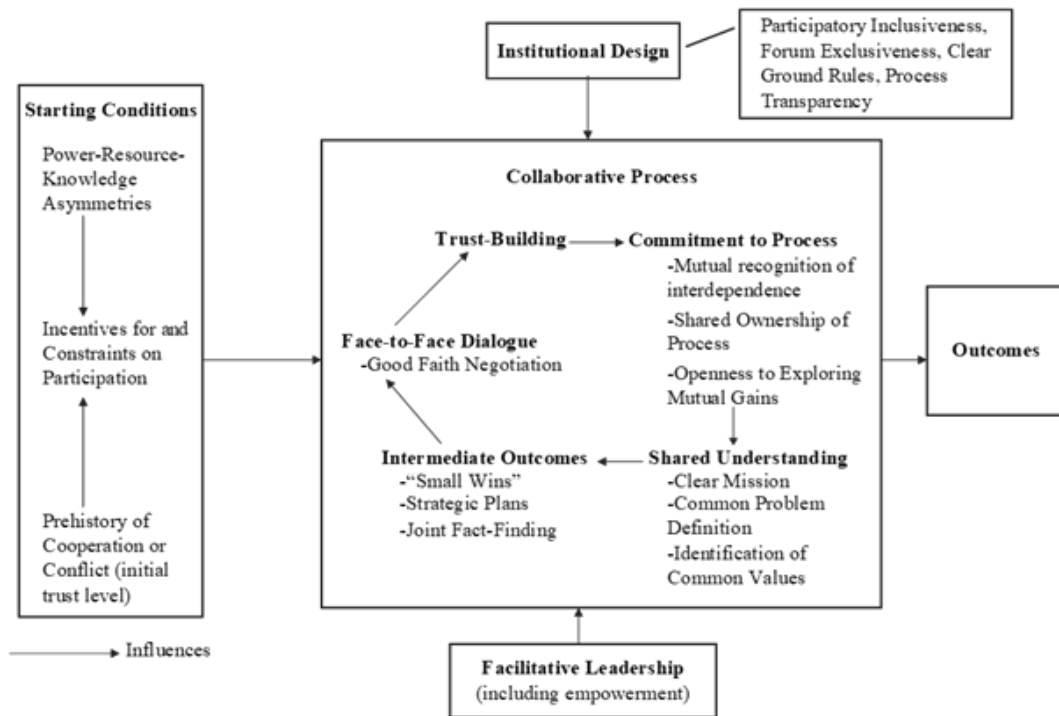
Model yang menonjolkan keberadaan lembaga administratif sebagai anggota jaringan atau penyedia layanan.

3. Model *network administrative organization*

Menitikberatkan pada keberadaan berbagai lembaga administratif yang bertugas mengelola jaringan, bukan menyediakan layanan, sementara manajernya menerima imbalan. Model tersebut menggabungkan aspek dari dua model sebelumnya.

Adanya model *collaborative governance* muncul dikarenakan banyaknya permasalahan di ranah publik sehingga membutuhkan peran dari berbagai aktor untuk memecahkannya agar lebih efektif dan efisien.

Gambar 1.3 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash



Sumber: Ansell dan Gash (2008)

Pada model *collaborative governance* yang dirumuskan oleh (Ansell & Gash, 2008), terdapat lima proses kolaboratif yang meliputi:

a. Dialog tatap muka (*face to face dialogue*)

Untuk membangun *collaborative governance* maka para *stakeholders* yang terlibat perlu menjalankan dialog tatap muka satu sama lain. Dialog ini menjadi orientasi munculnya kesepakatan antar pihak.

b. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Tidak dapat terpisah dari dilakukannya dialog, maka membangun kepercayaan perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Hal tersebut tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama serta butuh komitmen yang kuat. Karena kolaborasi melibatkan beberapa pihak maka kepercayaan harus

dibangun semaksimal mungkin agar memudahkan pelaksanaan peran dan tujuan pun dapat tercapai.

c. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*)

Untuk meningkatkan komitmen di antara para pemangku kepentingan, maka diperlukan suatu kondisi di mana adanya saling ketergantungan antar pihak. Karena kolaborasi bukan sekadar kesepakatan, melainkan merupakan suatu kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi semua pihak terkait di dalamnya.

d. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Ada titik di mana pemahaman bersama mengenai tujuan yang akan dicapai bersama harus dikembangkan oleh para stakeholders. Hal tersebut dapat berupa tujuan dan permasalahan yang jelas, serta nilai yang akan dicapai bersama juga haruslah jelas.

e. Hasil sementara (*intermediate outcomes*)

Jika hasil nyata dari adanya tujuan dan keuntungan kolaborasi dapat dirasakan, maka kolaborasi akan lebih mungkin untuk berlanjut, meskipun hanya kecil. Hasil tersebut dapat mendorong semua pihak yang terlibat untuk membangun kolaborasi serta komitmen bersama.

1.5.5. Faktor- faktor Collaborative Governance

Sedangkan faktor-faktor pendukung keberhasilan *collaborative governance* sesuai perspektif (Ansell & Gash, 2008), meliputi:

1. Kondisi awal (*starting conditions*)

Yaitu suatu kondisi yang dapat memberikan pengaruh berupa hambatan atau dorongan di dalam pelaksanaan kerja sama antar aktor yang terkait. Di dalam proses kondisi awal ini terdapat beberapa fenomena, yaitu (1) ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan, (2) insentif untuk kendala dan partisipasi, (3) prasejarah kerja sama atau konflik.

2. Desain kelembagaan (*institutional design*)

Desain kelembagaan mengacu kepada protokol serta aturan dasar dalam kolaborasi. Inklusivitas partisipasi menjadi salah satu proses dalam proses ini. Chrislip dan Larson (1994) dalam (Ansell & Gash, 2008) menyebutkan kondisi pertama dari kolaborasi yang berhasil adalah kolaborasi tersebut harus melibatkan seluruh stakeholder secara luas yang terpengaruh atau tertarik dengan masalah tersebut. Literatur menyatakan bahwa inklusivitas terkait erat dengan eksklusivitas forum kolaboratif. Dimana keterbatasan forum kolaborasi bisa memberikan dampak motivasi para stakeholder untuk ikut serta dalam proses kolaboratif. Selain dua hal yang telah disebutkan, aturan dasar yang jelas dan terbuka menjadi fitur desain yang krusial bagi keberlangsungan kolaborasi para stakeholders. Para stakeholders diyakinkan bahwa proses kolaborasi dijalankan secara adil, merata, serta transparan melalui aturan dasar yang jelas dan ditegakkan secara konsisten. Transparansi proses menunjukkan bahwa

negosiasi publik dalam proses kolaborasi bersifat nyata dan bukan kedok belaka untuk kepentingan pribadi.

3. Kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*)

Kepemimpinan fasilitatif memiliki peran yang kuat untuk menyatukan para pemangku kepentingan serta mendorong mereka agar memiliki keterlibatan satu sama lainnya saat melaksanakan kolaborasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam menetapkan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, dan pembagian keuntungan bersama.

1.5.6. Pengelolaan Sampah

A. Pengertian Sampah

Menurut (Azwar, 2002) sampah mengacu pada bagian dari hal yang sudah tidak dibutuhkan, tidak disukai ataupun perlu dibuang, yang biasanya bersumber dari aktivitas manusia termasuk kegiatan industri, tetapi biasanya berbentuk padat dan tidak bersifat biologis karena tidak termasuk kotoran manusia..

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya sampah memuat prinsip, yang mencakup:

- a. Ada sesuatu benda atau bahan padat.
- b. Ada keterkaitannya dengan manusia, baik dengan cara langsung ataupun tidak.
- c. Benda tersebut tidak lagi digunakan.

B. Cara-cara Pengelolaan Sampah

Cara-cara pengelolaan sampah (Azwar, 2002) meliputi:

1. Hog Feeding

Merupakan proses mengelola sampah jenis limbah agar bisa diolah menjadi makanan ternak.

2. Insenaration (pembakaran)

Yaitu dilakukan dengan membuang sampah di TPA, lalu dibakar. Sampah dibakar di ruang tertutup dengan menggunakan mesin dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk sistem ini. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian mesin dan peralatan lain dalam sistem ini membutuhkan biaya yang besar.

3. Sanitary Landfill

Pada pengelolaan sampah ini, untuk mencegah sampah menjadi tempat bersarangnya hewan, maka sampah ditimbun dengan tanah secara berlapis-lapis.

4. Composting (pengomposan)

Cara ini merupakan proses pengelolaan sampah dengan mengubah sampah organik menjadi bahan kompos. Sampah perlu disortir untuk memisahkan komponen organik dan anorganik agar dapat dijadikan kompos.

5. Discharge To Seweres

Yaitu proses mengelola sampah di mana sampah perlu dihaluskan dahulu sebelum dibuang ke saluran pembuangan air bekas. Metode ini

memerlukan biaya yang besar dan biasanya dilakukan secara terpusat di kota-kota.

6. *Dumping* (penumpukan)

Merupakan cara pengelolaan sampah dengan cara menumpuknya di atas tanah terbuka. Sistem ini dapat menghemat biaya pengeluaran, namun karena mengganggu masyarakat di sekitarnya sehingga jarang dilakukan.

7. *Individual Incineration*

Yaitu cara pengelolaan sampah melalui pembakaran yang dilakukan oleh masing-masing orang. Pembakaran perlu dilakukan dengan baik, agar asap dari pembakaran sampah tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

8. *Recycling*

Merupakan proses pengelolaan sampah dengan cara menguraikan sampah menjadi lebih kecil sehingga dapat digunakan kembali, contohnya seperti kaleng, kaca dan sebagainya. Namun, proses ini bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan benar.

9. *Reduction*

Hampir sama dengan *recycling*, *reduction* menyangkut proses penghancuran sampah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan hasilnya memiliki manfaat, seperti *garbage reduction* yang bisa menghasilkan lemak. Namun, biayanya sangat mahal dibandingkan dengan hasil yang ada.

1.6. Operasionalisasi Konsep

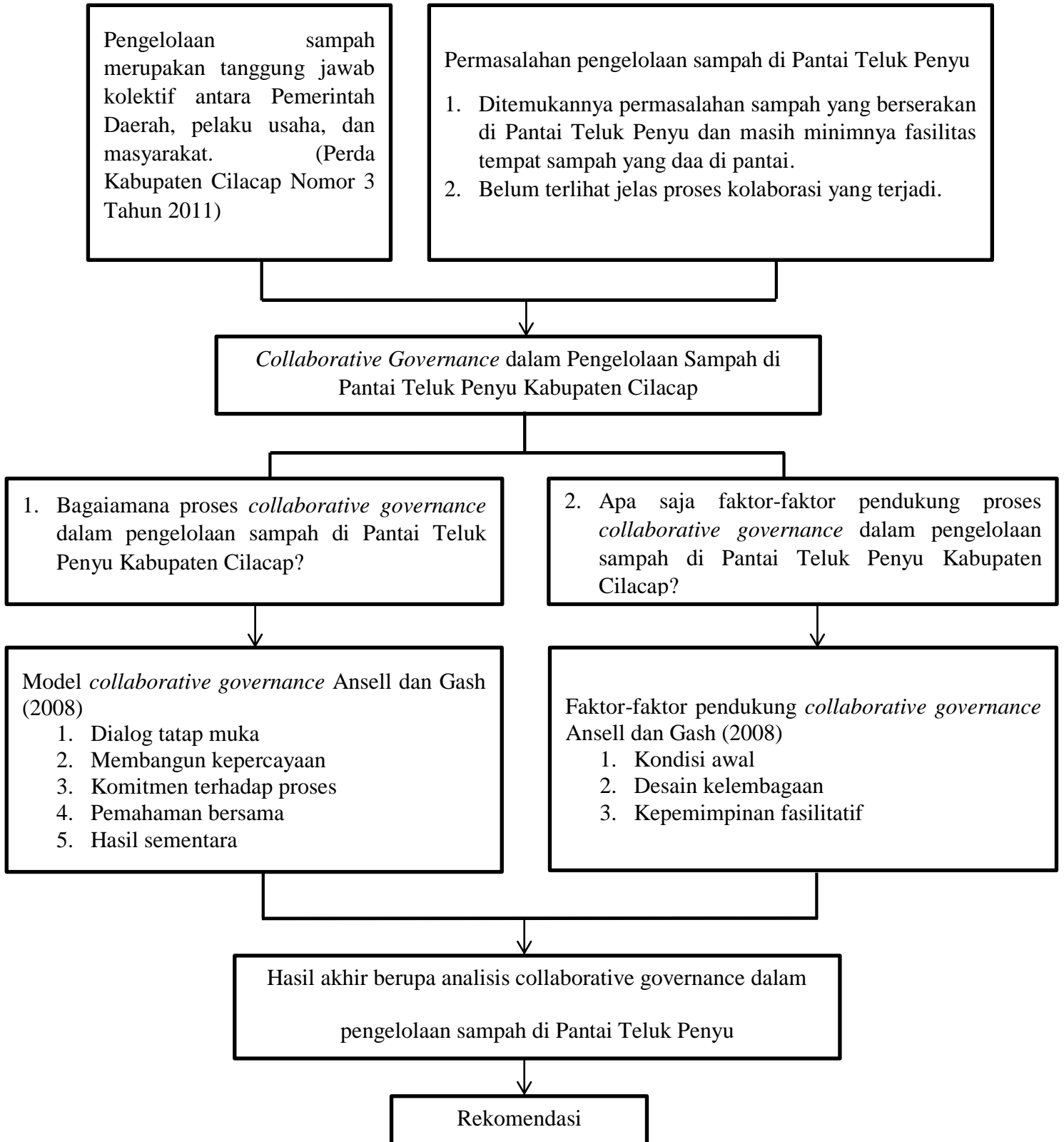
Dalam penelitian ini, *Collaborative Governance* diartikan sebagai proses kolaboratif berbagai pihak dalam membuat keputusan yang didasari oleh konsep model menurut Ansell dan Gash (2008). Model *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Fenomena Penelitian

Fenomena	Dimensi	Indikasi Penelitian
Proses <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap	Dialog tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog tatap muka antar pemangku kepentingan
	Membangun kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan
	Komitmen terhadap proses	<ul style="list-style-type: none"> • Saling memahami ketergantungan • Kepemilikan proses bersama • Keterbukaan terhadap pengembangan capaian bersama
	Pemahaman bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Misi yang jelas • Uraian masalah bersama • Pembentukan nilai-nilai bersama
	Hasil sementara	<ul style="list-style-type: none"> • Tolak ukur keberhasilan
Faktor-faktor pendukung <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap	Kondisi awal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakseimbangan antara kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan di antara para pemangku kepentingan • Insentif dan kendala partisipan • Sejarah konflik atau kerja sama di antara pemangku kepentingan
	Desain kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusivitas partisipan • Eksklusivitas forum • Aturan-aturan yang jelas • Transparansi proses
	Kepemimpinan fasilitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan aturan dasar yang jelas • Membangun kepercayaan • Memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan • Pembagian keuntungan bersama

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2023

Kerangka Berpikir



1.7. Argumen Penelitian

Adanya permasalahan sampah yang masih sering ditemukan pada pantai-pantai di Indonesia terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan di sekitarnya, begitu pula dengan kasus permasalahan sampah yang terjadi di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap. Para pengunjung hanya mau menikmati keindahan pantai saja namun banyak dari mereka yang tidak memperhatikan perilaku dan tindakannya terhadap sampah yang dihasilkannya. Satu orang berpikir bahwa tidak apa-apa jika ia membuang sampah karena sampah yang ia buang hanya satu buah saja. Namun, bagaimana jika semua orang berpikir demikian? Maka, pantai akan menjadi sarang sampah. Hal ini tidak boleh terjadi karena selain akan merusak keindahan pantai, hal tersebut juga akan berdampak buruk bagi ekosistem pantai dan juga lingkungan di sekitarnya.

Selain dari tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, faktor sarana dan prasarana juga memiliki pengaruh terhadap pengelolaan sampah di pantai. Tersedianya tempat sampah yang memadai dan terjangkau, akan menjadikan peluang baik bagi masyarakat yang ingin membuang sampah. Hal tersebut akan berbeda apabila fasilitas pembuangan sampah di sekitar pantai tidak ada atau tidak memadai maka hal tersebut akan mendorong masyarakat atau pengunjung untuk membuang sampah seenaknya sendiri.

Permasalahan sampah ini menjadi tugas berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pantai serta

membuang sampah pada tempatnya dan meningkatkan fasilitas atau sarana dan prasarana pembuangan sampah di pantai. Untuk mewujudkan hal tersebut secara maksimal, maka diperlukan proses kolaborasi yang tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga masyarakat itu sendiri serta dari pihak swasta atau lembaga sosial yang ada untuk mengelola masalah sampah di Pantai Teluk Penyu maupun pantai-pantai lainnya.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat di mana peneliti mengamati objek yang diteliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada subbab sebelumnya, maka Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap menjadi situs penelitian ini.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Ketua Pengelola Pantai Teluk Penyu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Cilacap, para pedagang di sekitar Pantai Teluk Penyu, mahasiswa dan swasta, karena mereka merupakan beberapa informan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan kolaborasi terkait pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.

1.8.4. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini yakni kualitatif. Data kualitatif, dinyatakan berbentuk kata verbal bukan angka. Data kualitatif pada penelitian ini yaitu keadaan obyek, keadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pengelolaan sampah, kolaborasi antar pihak, dan faktor-faktor pendukung kolaborasi.

1.8.5. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang dilakukan maka hal tersebut perlu didapatkan dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu satu individu ataupun lebih yang ditetapkan menjadi narasumber. Pada konteks ini, sumber data yang diterima adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat dengan langsung melalui informan yang telah dipilih secara khusus oleh peneliti untuk memberikan informasi atau data yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui surat kabar, berita, atau internet mengenai informasi masalah penelitian yaitu *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti akan bertanya-tanya terhadap informan terkait hal-hal yang berkenaan pada topik penelitian secara mendalam sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci. Dari jawaban dan respon dari para informan inilah peneliti akan memperoleh informasi/data. Sebelum melakukan wawancara maka peneliti perlu mempelajari dan memahami topik penelitian dan menyusun pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat menguasai proses wawancaranya. Pada teknik wawancara ini peneliti akan menjalankan wawancara bersama para informan dengan menggunakan bentuk pedoman wawancara semi terstruktur. Instrumen yang akan digunakan peneliti dalam melakukan wawancara yaitu alat perekam, alat tulis, serta pedoman wawancara.

2. Observasi

Pada teknik observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap pengelolaan sampah di Teluk Penyu, baik secara langsung ataupun melalui media sosial dan artikel berita yang tersedia untuk mendapat gambaran yang lebih rinci.

3. Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi, dokumen yang digunakan berupa foto saat melakukan penelitian, artikel berita, media sosial, maupun arsip dari informan. Melalui teknik ini, peneliti mengetahui secara lebih detail terkait

hal-hal yang berkenaan pada proses kolaborasi pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses pengolahan dan intepretasi data yang bertujuan mengorganisasikan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya dan memberikan makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dijalankan dalam tiga tahap, antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat dikatakan sebagai suatu proses penyeleksian masalah sesuai dengan fokus kegiatan. Reduksi data mengacu kepada teknik analisis yang melibatkan proses mengarahkan, mengelompokkan, menajamkan, membuang yang kurang diperlukan, serta mengatur data untuk menarik simpulan dan memverifikasinya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses pengorganisasian data supaya menjadi bermakna. Penyajian data merujuk pada sekumpulan informasi secara terstruktur, yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, maka akan memungkinkan untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, apakah harus lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan. Tulisan naratif adalah penyajian yang paling sering dipakai pada masa lalu untuk menampilkan data kualitatif. Di samping itu, berbagai jenis matriks, grafik,

jaringan dan bagan juga dipakai sebagai bentuk penyajian data. Pada penelitian ini, peneliti mempergunakan matriks atau tabel dalam penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan

Meskipun seorang peneliti mengklaim telah mengikuti proses induktif, kesimpulan seringkali sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ukuran koleksi catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan teknik pencarian ulang yang dipakai, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana. Kesimpulan ini juga diperiksa kembali selama proses penelitian. Makna yang dihasilkan dari data perlu dinilai dalam hal akurasi, keandalan, dan relevansinya.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data penelitian yang dipergunakan sangatlah memengaruhi validitas suatu hipotesis. Instrumen yang dipakai untuk pengumpulan data untuk memperoleh data yang berlaku menjadi penentu kualitas dan penelitian. Metode pengujian data yang diterapkan untuk menguji kualitas data pada penelitian ini yaitu uji triangulasi. Triangulasi merupakan penggalan kebenaran informasi data dengan melalui beberapa metode dan sumber penelitian. Selain menerapkan metode wawancara dan observasi, penelitian ini juga memakai metode pengumpulan data yang lain, yaitu dokumentasi.